

KERJASAMA ASEAN POWER GRID DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN LISTRIK DI INDONESIA

By: Andreas Said
Email: andreassaid199494@gmail.com
Supervisor: Den Yealta, S.IP. MA

Bibliography: : 10 Buku, 5 Jurnal, 5 Artikel, 6 Majalah, 5 Dokumen, 13 Internet

**Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau, Pekanbaru
Kampus Bina Widya JL. HR Subrantas Km. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru
28293
Telp/Fax: 0761-63272**

This study is an international political economy study discussing ASEAN Power Grid (APG) cooperation in increasing electrical resilience in Indonesia. This study aims to identify and impact APG cooperation in improving the electrical resistance of Indonesia. Indonesia is one of the countries with the largest electricity consumption in the world and number 1 in southeast asia. Where electricity becomes a basic necessity in everyday life as well as in the development of the country.

APG is a cooperation formed by all ASEAN members to improve electrical security and connect electricity to all member countries, as electricity becomes one of the basic needs that its availability is needed, APG also become a forum for private parties in improving the economy and also help the country in selling electricity supply, as well as a motivator for each country to improve domestic electrical resistance.

the increase of electrical resistance which is the objective of APG cooperation, requires Indonesia to cooperate with neighboring countries such as Malaysia and Singapore to implement the principal of cooperation is the buying and selling of electricity through transmission lines built together based on MoU APG.

In this case the authors use Noe-liberalism perspectives, supported by the theory of international cooperation and the concept of role and level of corporate analysis as an actor. The concept leads to qualitative methods and literature studies as a source of information..

Keywords: Role, ASEAN Power Grid (APG), Electrical security, Electricity rate

▪ **Pendahuluan**

Krisis listrik merupakan salah satu persoalan besar yang dihadapi oleh negara Indonesia. Peningkatan kebutuhan daya listrik tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas pembangkit mengakibatkan defisit energi listrik. Selain itu, masih banyak daerah-daerah terpencil belum memiliki akses terhadap listrik.¹ Masalah tersebut dikarenakan jarak antara tempt

tinggal penduduk yng berjauhan dan pembangunan yang tidak merata meskipun di dearah-daerah terpencil umumnya memiliki sumber daya alam.

Salah satu dampak dari krisis listrik yang di alami Indonesia adalah pemadaman listrik dan kerap terjadi di akibatkan defisit daya mampu pembangkit

¹ <http://eprints.ums.ac.id/40250/5/BAB%20I.pdf>
diakses pda 29 maret 2018

yang ada.² Kurangnya pemeliharaan pembangkit listrik yang telah ada dan tidak kurangnya pembangunan pembangkit yang baru merupakan hal yang menyebabkan defisit listrik tersebut.

Guna mengatasi permasalahan tersebut, berdasarkan asas dan tujuan perpres no. 30 tahun 2009, dinyatakan bahwa Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,³ dan adanya kerjasama dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura merupakan suatu usaha pemerintah dalam menanggulangi krisis listrik.

Listrik merupakan salah satu kunci agar terealisasinya pilar *ASEAN Economy Community* yang menyerukan supaya setiap negara yang tergabung dalam ASEAN (*Association South East Asia Nation*) terkoneksi dengan baik untuk menggerakkan wilayah yang terintegrasi, kompetitif, dan tangguh.⁴ Dalam merealisasikan program tersebut, pemanfaatan sumber daya energi yang kebutuhannya terus meningkat, menjadikan pemerintah setiap negara di kawasan Asia Tenggara berupaya untuk memulai program kerjasama antar negara kawasan tersebut demi meningkatkan ketahanan energi dalam negeri. Setiap negara akan selalu berusaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal untuk membawa bangsanya kepada kehidupan yang lebih baik.

² <http://www.dunia-energi.com/kondisi-listrik-indonesia-saat-ini-tidak-lebih-baik-dari-2009/> diakses pada 29 maret 2018

³ <http://prokum.esdm.go.id/uu/2009/UU%2030%202009.pdf> diakses pada 29 maret 2018

⁴ Christopher G. Zamora. 2015. HighReg APAEC. Edition: Asean Plan Of Action For Energy Cooperation Phase I. diunduh dalam: <http://www.aseanenergy.org/wp-content/uploads/2015/12/HighRes-APAEC-online-version-final.pdf>

ASEAN Power Grid (APG) merupakan program yang dimandatkan oleh para Kepala Negara ASEAN yang bertujuan guna mencapainya integrasi ekonomi ASEAN, yaitu menciptakan kawasan ekonomi regional yang berdaya saing tinggi dibidang *infrastructure development, energy cooperation*, ICT, dan pengembangan UKM.⁵ Pada pelaksanaan pertemuan ke 17 *ASEAN Ministers on Energy Meeting* di Bangkok pada bulan Juli 1997 yang menghasilkan dokumen APAEC 1999 - 2004 mencakup implementasi program APG. MoU APG ditandatangani para Menteri Energi pada bulan maret 2007 dengan tujuan untuk memperkuat kerjasama negara anggota ASEAN dalam pengembangan kebijakan interkoneksi dan transaksi tenaga listrik lintas batas, dan pada akhirnya untuk merealisasikan APG dalam rangka meningkatkan ketahanan energi regional.

Kerjasama ini memanfaatkan setiap sumber primer yang merupakan sumber energi listrik sekali pakai seperti batubara, gas alam, dan minyak bumi dalam menyediakan energi listrik berdasarkan proyek pembangunan pembangkit listrik dalam kerjasama yang telah ditetapkan. APG juga merupakan kerjasama yang memungkinkan bagi negara lain yang memiliki sumber energi listrik yang lebih banyak untuk mentransfer listriknya ke negara lain. Melalui proyek interkoneksi APG ini, pemerintah berupaya untuk meningkatkan ketahanan tenaga listrik di daerah terpencil dan daerah perbatasan negara Indonesia. Indonesia telah meratifikasi MoU APG tersebut melalui Perpres Nomor 77 Tahun 2008 tentang Pengesahan MoU APG.⁶

▪ Tinjauan Pustaka

Tingkat analisa yang digunakan dalam tulisan ini adalah tingkat analisa kelompok dan penulis menggunakan perspektif neo-liberalisme dalam menjelaskan fenomena

⁵ Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Indonesia. 2012. ASEAN Selayang Pandang. Jakarta Pusat.

⁶ Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2016. Buletin Ketenagalistrikan, Jakarta Selatan.

yang dibahas dalam tulisan ini. Penulis menggunakan perspektif neo-liberalis karena neo-liberalis menjelaskan bahwa aktor non negara merupakan aktor penting dalam Hubungan Internasional. Hal ini berarti bahwa negara tidak selalu menjadi aktor utama. Organisasi Internasional dan pihak swasta lain seperti perusahaan sebagai contoh, dapat menjadi aktor mandiri berdasarkan haknya. Lembaga dan perusahaan ini memiliki pengambil kebijakan, para birokrat, dan berbagai kelompok yang dapat dipertimbangkan pengaruhnya terhadap proses pengambilan kebijakan.⁷

Teori yang digunakan dalam menganalisa penelitian ini adalah teori kerjasama internasional. Kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai sebuah struktur formal yang berkesinambungan, yang dibuat berdasarkan pada perjanjian antar anggota-anggotanya dari dua atau lebih negara berdaulat untuk mencapai tujuan bersama dari para anggotanya.⁸ Menurut Teuku May Rudy, definisi organisasi internasional adalah pola kajian kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda.⁹

Berdasarkan definisi organisasi internasional menurut Teuku May Rudy tersebut dapat dikatakan bahwa organisasi internasional tidak hanya kepada tataran antar-pemerintah saja atau *states* tapi juga mulai masuk ke ranah non-pemerintah. HAPUA sebagai sebuah organisasi internasional yang menangani masalah

ketenagalistrikan dan bertujuan untuk memberikan aplikasi dan promosi dalam meningkatkan ketahanan listrik di kawasan Asia.

▪ Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini akan berusaha untuk menggambarkan, mencatat, dan menganalisa, serta mengintrepretasikan kondisi-kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terkait dengan kerjasama yang dilaksanakan.

▪ Pembahasan dan Hasil Penelitian

Dalam meningkatkan ketahanan listrik di Indonesia, kerjasama APG memberikan banyak peluang dan juga motivasi. Peluang yang diberikan antara lain adalah kerjasama pembelian listrik terhadap Malaysia yang telah dimulai pada awal tahun 2016, hal ini berdampak pada penghematan biaya produksi yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur listrik yang baru, selain itu adanya motivasi yang didapat Indonesia dari kerjasama APG dalam meningkatkan ketahanan listrik melahirkan program kelistrikan 35.000 MW, yang mana program ini bertujuan meningkatkan ketahanan listrik dalam negeri dari yang dilaksanakan pada tahun 2014 hingga 2019.

1. ASEAN Power Grid

ILO ditiadakan pada tahun 1919, sebagai bagian dari Perjanjian Versailles yang mengakhiri Perang Dunia I, untuk mencerminkan keyakinan bahwa perdamaian universal dan abadi hanya biasa dicapai bila didasarkan oleh keadilan sosial. Konstitusi ini dirancang antara Januari dan April pada tahun 1919, oleh Komisi Perburuhan yang dibentuk oleh Konferensi Perdamaian, yang pertama kali bertemu di Paris kemudian di Versailles. Komisi ini dipimpin oleh Samuel Gompers, Kepala Federasi Amerika Tenaga Kerja (AFL) di Amerika Serikat, yang terdiri dari Sembilan perwakilan negara yaitu: Belgia, Kuba, Cekoslowakia, Perancis, Italia, Jepang, Polandia, Inggris dan Amerika Serikat.

⁷ M.Saeri.2012. *Jurnal Transnasional: Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik*: Vol. 3, No. 2.

⁸ Archer, Clive. 1893. *International Organization*. London : University of Aberdeen, hal. 35.

⁹ Teuku May Rudy, *Administrasi Dan Organisasi Internasional*, Bandung, Refika Aditama, 2005, Hal 3

APG adalah sebuah inisiatif untuk membangun sebuah interkoneksi listrik regional dan menghubungkan wilayah, dengan persyaratan bilateral lintas batas, dan kemudian secara bertahap berkembang ke basis regional dan kemudian mengarah ke sistem jaringan listrik yang terpadu di Asia Tenggara. Sebagai salah satu proyek infrastruktur energi fisik dalam Masterplan Konektivitas ASEAN.¹⁰ Pembentukan APG didasari dari persetujuan akan MoU APG yang di tanda tangani pada tahun 2007,¹¹ yang merupakan salah satu langkah guna mempercepat pertumbuhan ekonomi.

APG memiliki beberapa bagian wilayah kerja dengan tujuan mempermudah akses pengaliran tenaga listrik dengan negara tetangga terdekat sesuai kesepakatan KERS. Dimana terdapat wilayah utara, selatan, dan timur. Greater Mekong di wilayah utara yang meliputi negara Laos, Myanmar, Kamboja, Vietnam, dan Thailand, di wilayah selatan ada negara Indonesia khususnya pulau Sumatra dan Kepulauan Riau, Singapura, dan Malaysia, serta di wilayah timur ada negara Indonesia khususnya pulau Kalimantan, Malaysia, dan Filipina.¹² APG diharapkan mampu menyeimbangi akselerasi pertumbuhan ekonomi dalam integrasi mea dan ASEAN *free tread area* yang menjadikan listrik sebagai kebutuhan pokok.

Interkoneksi listrik ASEAN diawali dengan di bentuknya sebuah organisasi kelistrikan HAPUA (*Heads of ASEAN Power Utilities/Authorities*) yang di tetapkan oleh para pemimpin negara anggota ASEAN.¹³ Aliran listrik keseluruhan kawasan ASEAN merupakan cara agar seluruh wilayah di Asia tenggara dapat meratakan penyediaan akan kebutuhan

listrik guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, baik rumah tangga maupun industri.

Rencana dalam pembangunan sektor energi, tercantum pada rencana kerja yang buat oleh HAPUA, yaitu APAEC pada tahun 1999 yang salah satunya membahas tentang rencana kelistrikan yang merupakan salah satu kebutuhan dalam faktor pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN.¹⁴ Listrik diproduksi secara besar-besaran dari sumber energi yang tersedia untuk memenuhi permintaan. Perkembangan transmisi dan distribusi tenaga listrik baru juga dipercepat, hal tersebut dapat menjadi sebuah upaya dalam memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat di kawasan Asia Tenggara.

Kemudian pada tahun 2007, pada kepala negara setiap anggota ASEAN sepakat dalam pembentukan MoU APG yang dibuat di Singapura dan merupakan hasil dari sebuah kesepakatan kerjasama energi yang pernah di bentuk pada tahun 1986.¹⁵ Tercantum dalam MoU APG, adanya berbagai aturan seperti penetapan teknis, pembiayaan, pajak dan tari, serta aturan dalam melakukan perdagangan listrik, merupakan bentuk dari kepedulian setiap negara anggota ASEAN untuk mengatur segala kegiatan dalam kerjasama APG. Dalam kerangka kerjasama APG telah disepakati bahwa kerjasama ini tidak menciptakan birokrasi baru, melainkan melalui proses persidangan dan pertemuan sebagai berikut:

- Senior Official Meeting

Rapat yang dilakukan oleh menteri atau pejabat senior dari setiap negara yang membahas materi yang akan dibahas dalam rapat menteri dari setiap negara.

- Working Group meeting

Rapat ini bertujuan untuk memfokuskan dan memaksimalkan penyusunan ketentuan yang akan dilaksanakan dalam suatu kerjasama, dan

¹⁰

<http://www.ASEAN.org/storage/images/2015/October/outreach-document/Edited%20APG-3.pdf>

¹¹

<http://agreement.asean.org/media/download/20140119102307.pdf> diakses pada 2-04-2018

¹² <http://www.aseanenergy.org/blog/the-evolution-of-electricity-trades-in-asean/> diakses pada 2-04-2018

¹³ <http://hapua.org/main/hapua/history-of-hapua/> diakses pada 5-04-2018

¹⁴ http://asean.org/?static_post=asean-plan-of-action-for-energy-cooperation-1999-2004 diakses pada 5-04-2018

¹⁵ Loc.cit <http://agreement.asean.org> diakses pada 5-04-2018

juga wadah dalam memberikan informasi yang berisi hambatan atau saran dari pemerintah atau pihak swasta dari setiap negara.

- **Ministers Meeting**

Merupakan sidang yang dilakukan oleh menteri yang sedang menjabat dari setiap negara. Menteri energi dan sumber daya mineral adalah perwakilan dari setiap negara dalam pertemuan ini.

- **Business council meeting / kerjasama dengan swasta IPP**

Pertemuan dari pihak swasta seperti perusahaan yang ikut andil dalam pelaksanaan kerjasama ini.

2. Potensi Listrik ASEAN dan Permasalahan Listrik Indonesia

ASEAN mengalami peningkatan permintaan energi sekitar 70% dari kurun waktu tahun 2000-2016. Peningkatan tersebut merupakan kontribusi dari peningkatan pendapatan, urbanisasi, peningkatan akses energi, dan perummbuhan populasi penduduk.¹⁶ Berbagai sumber energi yang di butuhkan seperti batu bara, minyak bumi, gas alam yang merupakan bahan bakar primer, sedangkan sumber energi sekunder seperti angin, air, panas bumi, dan biomasa merupakan sumber energi yang sedang tahap pengembangan. Permintaan energi yang terus meningkat merupakan suatu tantangan bagi ASEAN dalam melampaui target penyediaan energi oleh masing-masing negara anggotanya. ASEAN harus meningkatkan kerjasama di bidang pengembangan kebijakan dan harmonisasi sebagai penunjang dalam melaksanakan kerjasama di bidang energi.¹⁷ Intensitas energi harus digunakan guna mendorong kerjasama regional dan pertumbuhan ekonomi. Banyaknya sumber energi yang dimiliki negara anggota ASEAN menjadi sebuah tantangan tersendiri dalam mengelola dengan semaksimal mungkin

dan seefisien mungkin guna mempertahankan ketersediaan.

Beberapa negara ASEAN ada yang memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti gas alam dan minyak bumi, di Myanmar ada sumber daya air, namun ada beberapa negara yang sangat minim akan sumber daya kelistrikan. Hal tersebut merupakan tantangan bagi ASEAN guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara merata di regionalnya.

Seperti halnya di kawasan ASEAN, Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang luas, kondisi geografis, dan pembangunan yang tidak merata dan merupakan suatu tantangan bagi pemerintah dalam memacu permintaan yang tiap tahun kian meningkat.¹⁸ Pertumbuhan ratio elektrifikasi yang tiap tahun bertambah, merupakan bukti adanya usaha dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya akan energi listrik

Indonesia merupakan negara yang memiliki daerah-daerah terpencil dan pedesaan yang belum terjamah oleh energi listrik. Kurangnya perhatian dari pemerintah akan kebutuhan yang tiap tahun terus bertambah bukan karna tidak adanya alasan, melainkan karna kurangnya pasokan listrik yang dimiliki Indonesia saat ini, sedangkan kebutuhannya yang tiap tahun terus bertambah.

PT PLN yang tiap tahun menambahkan pasokan listrik sekitar 4000 MW ternyata masih kurang akan kebutuhan yang tiap tahun bertambah sekitar 5000 MW per tahunnya.¹⁹ Dengan kurangnya listrik yang disediakan pemerintah, merupakan suatu permasalahan yang bukan hanya dirasakan oleh masyarakat saja, namun juga menyulitkan bagi produsen dalam melaksanakan aktifitas perekonomian.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya di antara

¹⁸

<http://www.djk.esdm.go.id/pdfBuku%20Statistik%20KetenagalistrikanStatistik%20Ketenagalistrikan%20T.A.%202017.pdf> diakses pada 15 maret

¹⁹ <http://www.dunia-energi.com/indonesia-terancam-krisis-listrik-2018-dipicu-peningkatan-permintaan-konsumen/> di akses 12 maret 2017

¹⁶ https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEO2017SpecialReport_SoutheastAsiaEnergyOutlook.pdf diakses pada 13 februari 2018
¹⁷ *ibid*

negara kawasan Asia tenggara, terutama sumber primer bagi bahan bakar pembangkit listrik seperti batu bara, minyak bumi dan gas alam, namun berdasarkan tingkat penggunaan listrik per kapita, Indonesia merupakan salah satu negara yang rendah di kawasannya. Pada tahun 2012 dinyatakan bahwa kapasitas pasokan listrik di Indonesia berbanding jauh dengan tingkat populasi penduduknya.²⁰ Hal itu dikarenakan kurangnya jumlah pembangkit listrik di Indonesia dan pesatnya pertumbuhan penduduk.

PT.PLN merupakan BUMN yang memiliki tanggung jawab sebagai perantara pemerintah dalam melaksanakan penyediaan tenaga listrik, seperti yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 yang berisi berbagai aturan bagi PT. PLN menyediakan tenaga listrik seperti percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan seperti pembangkit listrik, gardu induk, jalur transmisi, dan juga berisi tentang pengikutsertaan pihak swasta dan juga mengenai pendanaan dalam penyediaan tenaga listrik.²¹ Adanya peraturan ini merupakan langkah yang dibuat oleh pemerintah dalam mempermudah penyediaan tenaga listrik, memberikan dana dan memberikan bantuan dalam melakukan pinjaman luar negeri guna melaksanakan pembangunan infrastruktur listrik.

Tahun 2013 pembangkit listrik yang telah dibangun dalam program *fast track* 10.000 MW mulai dioperasikan. Dari sekian banyak pembangkit listrik yang dibangun, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) memiliki peningkatan jumlah pembangkit yang progresif dari tahun ke tahun. Dari segi kapasitas PLTU juga memiliki kapasitas terpasang paling tinggi. PLTU dijadikan pembangkit listrik utama

pengganti Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), meskipun begitu dari segi jumlah dan kapasitas serta daya mampu pembangkit listrik ini masih terpusat di wilayah Jawa dan Bali. Di luar Jawa dan Bali, pembangkit yang banyak dipakai adalah pembangkit listrik tenaga diesel yang berbahan bakar minyak. Pembangkit listrik ini masih mendominasi sebagai penyedia pasokan listrik di area luar Jawa dan Bali.²²

3. Motivasi Peningkatan Ketahanan Listrik Indonesia Paska Kerjasama APG

Adanya peningkatan yang signifikan dengan penambahan pelanggan listrik membuktikan bahwa ada suatu kemajuan kerjasama APG dalam meningkatkan rasio elektrifikasi. Namun fokus kerjasama ini adalah interkoneksi antar negara anggota ASEAN, jadi di Indonesia sendiri tidak semua daerah yang tergabung dalam kerjasama tersebut. Berdasarkan ASEAN *Interconnection Masterplan Study II*, Indonesia memiliki 5 wilayah interkoneksi yaitu Sumatra utara, Riau, Batam, dan Kalimantan barat, Kalimantan utara.²³ Hal tersebut dikarenakan keempat wilayah tersebut dekat dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, selain berdekatan dengan wilayah negara tetangga, keempat wilayah tersebut juga merupakan wilayah yang memiliki rasio elektrifikasi yang rendah.

Bertambahnya rasio elektrifikasi berarti bertambah pula konsumsi listrik per kapita. Berdasarkan sudut pandang ekonomi, keberadaan sebuah negara yang dapat dirasakan masyarakatnya dinilai dari 4 sektor, yaitu fasilitas umum, tempat pendidikan, tempat kesehatan, dan

²⁰

<https://www.pwc.com/id/en/publications/assets/electricity-guide-2013.pdf> di akses pada 12 maret 2018

²¹

<http://jdih.bumn.go.id/baca/PERPRES%20Nomor%2014%20Tahun%202017.pdf> diakses pada 24 maret 2018

²²

http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn_EFI_SIENSI_OPERASIONAL_PEMBANGKIT_LISTRIK_DEMI_PENINGKATAN_RASIO_ELEKTRIFIKASI_DAERAH20140821143056.pdf diakses pada 22 maret 2018

²³ Mr.Kornphat Srisuping. 2013. ASEAN Power Grid. Diunduh dari

http://www.unescap.org/sites/default/files/EGAT_ASEANPowerGrid.PDF diakses pada 6-04-2018

ketahanan listrik yang mencukup.²⁴ Listrik yang menyesuaikan peningkatan kebutuhan tiap tahunnya, yang berarti adanya peningkatan konsumsi listrik perkapita.

Konsumsi listrik perkapita Indonesia pada tahun 2014 yaitu 811,9 kwh, angka ini masih terbilang rendah dibandingkan dengan negara Singapura atau Malaysia, yang mana Malaysia 4.596 kwh dan Singapura dengan angka 8.845 kwh.²⁵ Namun adanya peningkatan yang dilakukan oleh pemerintah pada akhir tahun 2017 dengan angka 1.129 kwh merupakan sebuah bukti adanya upaya keras mengingak bersarnya wilayah Indonesia.²⁶ Selain peningkatan ketahanan listrik dengan impor listrik yang dilakukan Indonesia dengan Malaysia, motivasi yang diberikan oleh kerjasama APG merupakan bukti adanya dampak positif dalam kerjasama ini bagi Indonesia. Meskipun demikian, di Indonesia sendiri masih Kalimantan barat yang baru terhubung dalam interkoneksi dengan Malaysia berdasarkan MoU APG, yang mana keempat wilayah lainnya akan dimulai pada tahun 2020 dan merupakan kerjasama dimana Indonesia akan menjadi negara pemasok listrik.

Selain adanya motivasi yang diberikan paska kerjasama APG, kerjasama ini juga mengutamakan pihak swasta sebagai produsen listrik mayoritas dan hal tersebut juga memberikan Indonesia sebuah langkah dalam meningkatkan ketahanan listrik dalam negeri Indonesia dengan program 35.000 mw. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

²⁴ Bob S. Effendi, 2017. Listrik sebagai *Driver* Pertumbuhan Ekonomi. Diunduh dari https://www.kompasiana.com/bob911/listrik-sebagai-driver-pertumbuhan-ekonomi_59b5fa3408d319177e1730b2 diakses pada 29-04-2018

²⁵ <https://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.ELE.C.KH.PC?end=2014&locations=ID&start=2012> diakses pada 29-04-2018

²⁶ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/11/inilah-konsumsi-listrik-nasional> diakses pada 29-04-2018

(RPJMN) 2015-2019 telah ditetapkan aksi peningkatan listrik Indonesia yang dimulai pada tahun 2014 hingga akhir 2019, dan juga mengutamakan pihak swasta sebagai produsen listrik guna meningkatkan perekonomian dalam negeri.²⁷

Sistem kelistrikan Kalbar terdiri dari atas 1 sistem interkoneksi, yaitu sistem Khatulistiwa antara Kalbar-Serawak, dan 7 sistem *isolated* yaitu sistem Ketapang, Ngabang, Sekadau, Sanggau, Nanga Pinoh, Sintang, Putusibau. Neraca daya total sistem di Kalbar memiliki daya mampu sebesar 499 MW, beban puncak sebesar 481 MW, dan cadangan sebesar 18 MW.²⁸

PT. PLN Kalbar mengimpor listrik dari SESCO melalui jaringan transmisi 275 kV sepanjang 120 km yang menghubungkan gardu induk GITET Bengkayang (Kalbar) dengan GITET Mambong (Serawak). Jumlah menara transmisi milik Indonesia (dari GITET Bengkayang sampai perbatasan) sebanyak 201 menara dan menara transmisi milik Malaysia (dari GITET Mambong sampai perbatasan) sebanyak 144 menara. Jangka waktu kerja sama jual beli tenaga listrik antara PT PLN dengan SESCO (*Sarawak Electricity Supply Corporation*) adalah selama 20 tahun yang terdiri dari :²⁹

- a. Fase pertama (5 tahun): skema *take and pay*, di mana PT PLN (Persero) Wilayah Kalbar mengimpor tenaga listrik dari SESCO mulai dari 50 MW dan naik secara bertahap tergantung kesiapan jaringan transmisi di Indonesia dan membayar sesuai dengan jumlah energi listrik yang diimpor.
- b. Fase kedua (15 tahun): skema *take or pay*, di mana dimungkinkan bagi kedua pihak untuk saling

²⁷ Op.Cit. <http://listrik.org/pln/program-35000-mw/> diakses pada 29-04-2018

²⁸ Mengenal ASEAN Power Grid, 2016. Diunduh dari <http://www.djk.esdm.go.id/index.php/detail-berita?ide=4119> diakses pada 17-04-2018

²⁹ *ibid*

bertransaksi jual beli tenaga listrik dengan kapasitas jual beli yang akan dibicarakan.

Tujuan dari dibuatnya 2 bagian kontrak ini adalah untuk membuat Indonesia tidak terus terikat dengan kelistrikan Malaysia. Dalam fase kedua, Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kelistrikannya dan bisa mengekspor listrik ke Malaysia. Selain bertujuan untuk meningkatkan pasokan listrik, kerjasama ini juga mengurangi biaya produksi listrik berarti pengurangan biaya dalam pengadaan. Hal ini akan memberikan keuntungan bagi masyarakat dan juga negara. Keandalan listrik merupakan contoh suatu wilayah tersebut maju dibidang perekonomian, karena akan mengundang investor dalam mendirikan perusahaan, sedangkan listrik dengan keandalan yang rendah, menandakan bahwa wilayah tersebut masih dalam perekonomian yang rendah, karena hal tersebut menyebabkan kurangnya minat dari para investor menimbang harga produksi listrik yang mahal.³⁰

4. Program 35.000 MW

Indonesia yang terus meningkatkan ketahanan listrik dan pertumbuhan ekonomi, merupakan salah satu langkah menuju negara yang semakin maju, hal tersebut dikarenakan pertumbuhan masyarakat Indonesia yang semakin bertambah banyak dan kebutuhan pun semakin bertambah. Selain itu, adanya motivasi yang diberikan oleh kerjasama internasional merupakan dampak positif bagi pemerintah dalam menetapkan program pembangunan. Hal tersebut dilakukan agar Indonesia dapat menjadi negara maju layaknya Malaysia dan Singapura.

Pada tahun 2014, pemerintah Indonesia menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2015-2019, terdapat 3 dimensi pembangunan negara,

³⁰ Weida He, Chuan Zhang, Rong Hao. 2015. Analysis of Electricity Price Policy and Economic Growth. Vol.74 thn 2015 Diunduh dari <http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/30286/1/JSIR%2074%281%29%2011-18.pdf> diakses pada 18-04-2018

yang pertama yaitu pembangunan manusia dan masyarakat, yang kedua pemerataan dan kewilayahan, dan yang ketiga adalah pembangunan sektor unggulan atau prioritas.³¹ Peningkatan manusia dan masyarakat guna menghasilkan manusia yang berkualitas guna meningkatkan taraf pekerja dalam negeri, kemudian ketersediaan manusia yang berkualitas akan mempercepat pemerataan pembangunan wilayah guna peningkatan perekonomian setiap daerah, adapun hal tersebut membutuhkan yang namanya sektor unggulan seperti pangan, dan energi seperti kelistrikan, karena kelistrikan merupakan salah satu acuan menaik kemajuan suatu daerah.

Program kelistrikan 35.000 merupakan program pemerintah yang bertujuan meningkatkan ketahanan listrik dalam 5 tahun kedepan dari 2014-2019. Sepanjang 5 tahun ke depan, pemerintah bersama PLN dan swasta akan membangun 109 pembangkit, masing-masing terdiri 35 proyek oleh PLN dengan total kapasitas 10.681 MW dan 74 proyek oleh swasta dengan total kapasitas 25.904 MW. Dan pada tahun 2015 PLN akan menandatangani kontrak pembangkit sebesar 10.000 Mw sebagai tahap pertama dari total keseluruhan 35.000 Mw.³² Program ini merupakan persiapan Indonesia demi menghadapi kerjasama APG pada 2020 mendatang dengan negara Malaysia dan Singapura yang akan menguntungkan bagi Indonesia selaku pengeksport listrik.

5. Pembuatan Peraturan Terkait Permudahan Pengadaan Listrik dalam Negeri

Hambatan dalam peningkatan ketahanan kelistrikan dapat diatasi dengan

³¹ KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL. 2014. Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019. Diunduh dari <http://www.social-protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?ressource.ressourceId=50077> diakses pada 05-04-2018

³² Op.Cit. <http://listrik.org/pln/program-35000-mw/> diakses pada 05-04-2018

peran pemerintah dalam membuat aturan-aturan sehingga harmonisasi antara visi dan misi program kelistrikan 35.000 Mw dapat tercapai pada waktu yang ditentukan guna mempersiapkan diri untuk kerjasama APG 2020 mendatang. Adapun salah satu masalahnya adalah pembebasan lahan untuk pembangunan pembangkit atau jaringan transmisi yang baru.

Pembebasan lahan berarti pembelian lahan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat namun tidak dengan harga yang sesuai, hal tersebut merupakan alasan kenapa hal tersebut sulit untuk dilakukan, selain itu adanya permasalahan budaya disetiap daerah menjadi permasalahan utama karena membutuhkan pendekatan guna menyelesaikan pekerjaan.³³ Intinya harus ada pendekatan yang sesuai agar ganti rugi lahan dapat terlaksana dengan baik dan program pemerintah pun berjalan dengan lancar.

Mengingat kerjasama APG yang ditandatangani pada tahun 2007, pemerintah Indonesia menimbang sulitnya pembebasan lahan dan kemudian menetapkan undang-undang nomor 2 pada tahun 2012 tentang pembebasan lahan.³⁴ Hal tersebut juga mempermudah dalam pembebasan lahan dengan pendekatan dan penetapan harga yang sesuai oleh pemerintah terhadap pemilik tanah, hal ini dapat mempermudah pemerintah Indonesia dalam melaksanakan program 35.000 Mw.

Kesimpulan

Indonesia merupakan negara terbesar dan dengan populasi terbesar di kawasan Asia tenggara, adanya kebutuhan akan

energi listrik merupakan hal penting dalam peningkatan ekonomi negara dan juga sebagai layanan negara terhadap masyarakatnya, selain itu listrik menjadi tolak ukur berkembang atau tidaknya sebuah negara dan layak atau tidaknya bagi investor untuk berinvestasi. Karena luasnya wilayah dan kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan, sulitnya interkoneksi dalam negeri menjadi hambatan tersendiri bagi Indonesia untuk mengaliri listrik dari daerah yang maju ke daerah pedesaan atau yang memiliki kelistrikan yang rendah.

Indonesia yang telah mengesahkan MoU kerjasama APG ke dalam Perpres no. 77 tahun 2008 dimana kerjasama tersebut merupakan kerjasama kelistrikan yang menghubungkan setiap negara anggota ASEAN menjadi satu aliran listrik, memberikan dampak positif bagi Indonesia, tidak hanya dalam meningkatkan pasokan dan keandalan listrik suatu wilayah yang terhubung dalam kerjasama tersebut, namun juga memberikan motivasi untuk meningkatkan ketahanan listrik dalam negeri Indonesia, mengingat kerjasama di beberapa wilayah Indonesia akan dilaksanakan pada tahun 2020 mendatang. Adapun motivasi yang diberikan ialah menciptakan proyek yang dapat meningkatkan ketahanan listrik dan memperbaiki regulasi terkait kelistrikan dan pengadaan infrastruktur listrik.

Kalimantan barat merupakan daerah di Indonesia yang menjadi proyek pertama dalam interkoneksi APG yang telah dimulai pada awal tahun 2016 yang memberikan penghematan biaya produksi dikarenakan Indonesia membeli listrik dari Malaysia melalui perusahaan listrik SESCO yang dikirim ke PLN Kalbar. Interkoneksi Kalbar dengan serawak memiliki 2 fase perjanjian, perjanjian pertama fokus mengenai pembelian listrik oleh PLN Kalbar ke SESCO Malaysia, dan perjanjian fase kedua mengenai perjanjian jual-beli antar perusahaan listrik berdasarkan beban puncak setiap daerah. Selain di wilayah Kalbar, wilayah Indonesia lainnya yang masuk dalam kerjasama APG berdasarkan studi AIM ke II adalah Sumatra, Batam, dan Kalimantan

³³ <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2667538/sulit-bebaskan-lahan-untuk-proyek-di-ri-ini-sebabnya>. diakses pada 05-04-2018

³⁴ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM. 2012. Diunduh dari <http://www.bpn.go.id/PUBLIKASI/Peraturan-Perundangan/Undang-Undang/undang-undang-nomor-2-tahun-2012-876> diakses pada 05-04-2018

utara, namun kerjasama ketiga wilayah tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2020.

Program 35.000 Mw, merupakan salah satu motivasi yang lahir dari adanya kerjasama APG, program ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan listrik Indonesia yang dimulai dari tahun 2014 hingga 2019, sedangkan kerjasama innterkonesi APG diberbagai wilayah seperti Sumatra, Kalimantan utara, dan Batam akan dilaksanakan pada tahun 2020. Selain motivasi yang dituangkan dalam bentuk program kerja, adanya motivasi untuk mengikut sertakan pihak swasta dalam pengadaan listrik sebagai investor, merupakan bukti bahwa Indonesia menginginkan perkembangan ekonomi dalam negeri

▪ Daftar Pustaka

Jurnal

- Atika Octavia H. Muhammad Badaruddin. 2016. *Posisi Indonesia Pada Kerjasama Energi Regional Dalam Memsuki Era Masyarakat Ekonomi ASEAN Studi kasus: APG*.
- Asra Virgianita, et all. 2015. *Tren Batubara: Tantangan dan Peluang Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Publish What You Pay Indonesia*. Jakarta Selatan
- Daniel Yergin, 2006. *Ensuring Energy Security*. foreign affairs . Volume 85 No. 2
- Elis Jessica Mening. 2013. *Problematis Yuridis Pt. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dalam Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan*.
- Heny Kristmana S.2017. *Membangun Keamanan Energi ASEAN Melalui Integrasi Listrik Regional (Implementasi APG di Kalbar-Serawak*.

Buku

- Christopher G Zamora, 2015. *ASEAN Plan for Action Energy Cooperation (2016-2025)*. Jakarta.
- Fawcett, Louise. 1996. *"Regionalism in Historical Perspective"*.

Regionalism in World Politics: Regional Organization and International Order edited by Louise L'Estrange Fawcett, Hurrell Fawcett, Andrew Hurrell. Oxford University Press. ISBN 0-19-828067-X.

- Jackson, Robert & Sorensen. 1999. *Introduction to International Relations*. Oxford University Press. Georg
- T. May Rudy. 1998. *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Bandung. Refika Aditama.
- Joseph S. Nye, 1968. *Introduction: Regionalism (International Organization)*, Little Brown and Company. Boston.
- Koesnadi Kartasamita. 1977. *Administrasi Internasional*. Lembaga penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
- Mas'ood Mochtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan ilmu*. Jakarta: LP3ES
- Moleong Lexy J., 2004, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya
- Soerjono Soekanto, 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Keempat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Winham, Gilbert R. 2008. *"The Evolution of the Global Trade Regime"*, dalam John Ravenhill, *Global Political Economy*, Oxford : Oxford University Press

Artikel

- Besse Tenriabeng, Badriyah Rifai, Juajir Sumardi, *Peranan Pt. Pln (Persero) Dalam Pelayanan Kelistrikan*.
- Bob S. Effendi. 2017. *Listrik sebagai Driver Pertumbuhan Ekonomi*
- Mr.Kornphat Srisuping. 2013. *ASEAN Power Grid*
- Novijan Janis. *ASEAN Infrastructure fund (AIF) Inisiatif Lembaga Pembiayaan Infrastruktur Untuk Kawasan ASEAN*
- Tulus Tambunan. 2006. *Keadilan dalam Ekonomi*.

Majalah

- Christopher G. Zamora. 2015. *HighReg APAEC*. Edition: Asean Plan Of

Action For Energy Cooperation Phase I.
 Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
 Kementerian Energi dan Sumber
 Daya Mineral. 2016. Statistik
 Ketenagalistrikan 2015. Jakarta.
 Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN
 Departemen Luar Negeri
 Indonesia. 2012. Jakarta Pusat
 Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
 Kementerian Energi dan Sumber
 Daya Mineral, 2016. Buletin
 Ketenagalistrikan, Jakarta Selatan.
 Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
 Kementerian Energi dan Sumber
 Daya Mineral. 2013. Program
 Listrik Perdesaan di Indonesia:
 Kebijakan, Rencana dan
 Pendanaan. Jakarta
 International Energy Agency. 2017.
 Southeast Asia Energy Outlook

Dokumen

ASEAN Agreement. 2007. MoU ASEAN
 Power Grid
 Presiden Republik Indonesia. 2017.
 Peraturan Presiden Republik
 Indonesia Nomor 14 Tahun 2017.
 Kementerian Energi dan Sumber Daya
 Mineral. 2015. Rencana Umum
 Ketenagalistrikan Nasional 2015-
 2034.
 Peraturan Presiden no. 30 tahun 2009
 Undang-Undang Republik Indonesia
 Nomor 2 Tahun 2012 Tentang
 Pengadaan Tanah Bagi
 Pembangunan Untuk Kepentingan
 Umum.

Website

<https://www.adb.org>
[http://www.kemlu.go.id/Documents/Kerja
sama%20Ekonomi%20ASEAN.do
c](http://www.kemlu.go.id/Documents/Kerjasama%20Ekonomi%20ASEAN.doc)
[http://www.djk.esdm.go.id/index.php/detai
l-berita?ide=4306](http://www.djk.esdm.go.id/index.php/detail-berita?ide=4306)
[http://ilmupengetahuanumum.com/profil-
10-negara-anggota-asean](http://ilmupengetahuanumum.com/profil-10-negara-anggota-asean)
<http://hapua.org/main/hapua/about/>
[http://www.kamuskbbi.web.id/arti-kata-
ketahanan-kamus-bahasa-
indonesia-kbbi.html](http://www.kamuskbbi.web.id/arti-kata-ketahanan-kamus-bahasa-indonesia-kbbi.html)

<https://www.kemenkeu.go.id>
[http://www.dunia-energi.com/kondisi-
listrik-indonesia-saat-ini-tidak-
lebih-baik-dari-2009/](http://www.dunia-energi.com/kondisi-listrik-indonesia-saat-ini-tidak-lebih-baik-dari-2009/)
<http://listrik.org/pln/program-35000-mw/>
<https://www.iea.org>
<http://www.satuenergi.com>
[https://dkn.go.id/ruang-opini/9/jumlah-
pulau-di-indonesia.html](https://dkn.go.id/ruang-opini/9/jumlah-pulau-di-indonesia.html)
[http://bphn.go.id/news/2015102805455371
/INDONESIA-MERUPAKAN-
NEGARA-KEPULAUAN-YANG-
TERBESAR-DI-DUNIA](http://bphn.go.id/news/2015102805455371/INDONESIA-MERUPAKAN-NEGARA-KEPULAUAN-YANG-TERBESAR-DI-DUNIA)
[https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/
20/1268/laju-pertumbuhan-
penduduk-menurut-provinsi.html](https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/20/1268/laju-pertumbuhan-penduduk-menurut-provinsi.html)
[https://www.bkkbn.go.id/detailpost/laju-
pertumbuhan-penduduk-4-juta-per-
tahun](https://www.bkkbn.go.id/detailpost/laju-pertumbuhan-penduduk-4-juta-per-tahun)
<http://prokum.esdm.go.id>
[https://finance.detik.com/berita-ekonomi-
bisnis/d-2667538/sulit-bebaskan-
lahan-untuk-proyek-di-ri-ini-
sebabnya.](https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2667538/sulit-bebaskan-lahan-untuk-proyek-di-ri-ini-sebabnya)